

## ABSTRAKSI

Hubungan politik Indonesia-Australia Pasca Penyadapan Australia Terhadap Negara Indonesia (Studi Kasus : Penyadapan Australia Bila Di Tinjau Dari Hukum Internasional)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum internasional terhadap penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada Presiden Republik Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari penyadapan terhadap hubungan diplomatik kedua negara

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Untuk pembahasan masalah penulis menggunakan teknik penulis analisis kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan Australia kepada Presiden Republik Indonesia tidak diatur tegas dalam hukum internasional paa umumnya dan dipandang sebagai perbuatan yang tidak illegal, namun secara khusus Australia telah mencederai ketentuan dalam Perjanjian Lombok, terlebih penyadapan merupakan sebuah tindakan yang tidak bersahabat dan tidak seharusnya dilakukan antara teman 'teman' (*an unfriendly act and an act unbecoming among 'fiends'*). Jalur penyelesaiannya bukan melalui jalur hukum akan tetapi lebih tepatnya melalui jalur diplomatik (*diplomatic channel*).

Kata Kunci : Penyadapan, Indonesia, Australia